łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

Suska

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

**TUGAS AKHIR** 

# **KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)** PERDESAAN DAN PERKOTAAN UPT PENDAPATAN milik DAERAH DI WILAYAH AIR JAMBAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Disusun Dan Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas Akademik Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya





**NIKEN AYU RESTIANI** NIM.02170623200

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN Su FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM Syarif Kasim Riau **RIAU** 2023/2024

Nama

Nim

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Dilarang mengutip Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyus Program Studi Judul Tugas Akhir karya tulis

kritik atau tinjauan suatu masalah

# LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

: NIKEN AYU RESTIANI

: 02170623200

: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

<sub>∞</sub>Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

> :KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) PERDESAAN DAN PERKOTAAN UPT PENDAPATAN DAERAH DI WILAYAH AIR JAMBAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN **BENGKALIS**

> > Pekanbaru, 04 Juli 2024

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING** 

Dr. Muhammad April., S.H., M.H NIP.19860405 202321 1 018

**MENGETAHUI** 

Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP.19700826 199903 2 001

KETUA PROD

NIP 19790911 201101 1 003



Hak ci

# LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA

: NIKEN AYU RESTIANI

NIM

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

ını tanpa

mencantumkan dan menyebutkan sumber

: 02170623200

**PROGRAM STUDI** 

: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

**FAKULTAS** 

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

SEMESTER

: VI (ENAM)

JUDUL

:KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) PERDESAAN DAN PERKOTAAN UPT PENDAPATAN DAERAH DI WILAYAH AIR JAMBAN KECAMATAN

MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

TANGGAL UJIAN

\_\_\_

: 27 JUNI 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hariza Hasyim, S.E., M.Si

NIP. 197609102009012003

Sekretaris

Rony Jaya, S.Sos., M.Si

NIP. 130717060

Penguji I

Muslim, S.Sos., M.Si

NIP. 198202052015031002

Penguji II

Ari Nurwahidah, S.E., MM

NIP. 19780105 2007102002

ABEHU

ian Syarif Kasim Riau

mencantumkan dan menyebutkan sumber



Lampiran Surat:

Nomor: Nomor 25/2021 Surat: 10 September 2021

# **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Niken Aru Pestiani

Nim =

: 02170623200

Tempat/Tanggal Lahir: Karya Mukti, 30 Januari 2003

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomí Dom Ilmu Sosien

Prodi

sebagian atau seluruh karya tulis

: D-111 Administrali Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

Wayib Pajak Bumi Pan Bangunen UPT Pendapatein Daerah Di Willeyert Manday Kabuputen

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

> Pekanbaru, 8 Juli 2029 Yang membuat pernyataan

NIM: 02170623200

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak c

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I N

**ABSTRAK** 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)
PERDESAAN DAN PERKOTAAN UPT PENDAPATAN DAERA DI
WILAYAH KELURAHAN AIR JAMBAN KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS

Oleh:

# NIKEN AYU RESTIANI NIM.02170623200

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk pajak negara yang dipungut oleh masyarakat Daerah Kecamatan Mandau cukup handal dalam meningkatakan pendapatan asli daerah di Kecamatan Mandau. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector PBB-P2, maka tingkat kepatuhan wajib pajak harus diperhatikan agar target penerimaan yang diharapkan dapat tercapai. Pada dasarnya PBB-P2 menggunakan dua system pemungutan yaitu, self assessment system dan official assessment system, yang mana kedua system ini diterapkan dalam kegiatan berbeda, yaitu self assessment system diterapkan dalam kegiatan menyerahkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), sedangkan official assessment system diterapkan dalam menentukan besarnya PBB-P2 yang terutang. Oleh karena itu, sistem pemungutannya sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak PBB-P2

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wajib Pajak, Pajak PBB-P2

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

T a

\_

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat karunia serta hidayah-Nya dan tak lupa pula shalawat beriringkan salam atas junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir ini însyallah tepat pada waktunya,dengan judul "KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) PERDESAAN DAN PERKOTAAN UPT **PENDAPATAN** DI WILAYAH **AIR JAMBAN DAERAH** KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS". Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Diploma lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk yang teristimewa kepada Ayah saya Tri Mulyono, Ibu saya Nurpuji Asiah S.Pd, Kakek saya H.Imam Kusno, Nenek Hj.Tasmiatun, dan keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan mereka semua keberkahan, kesehatan, kebahagiaan di dunia akhirat, dan semoga penulis menjadi kebanggaan keluarga serta tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

- 2. Tak lupa penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada Adik kandung saya Khoirun Nisa Triani, Bintang Maulana Akbar, Faza Khoirul Fahmi, Sahabat saya Mayang Sari, Azzahra Chairunnisa, Adik angkat saya Vina Agutin, Vini Agustin dan kerabat teman saya sedari kecil Maryana, Maryati mereka semua yang menjadi support system penulis dalam proses penyelesaian Tugas Akhir Penelitian.
- 3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Ketua Jurusan.
- 5. Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbimbang dan arahan dalam menyusun laporan Tugas Akir.
- 6. Bapak Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. AK selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari segala aktivitas Mahasiswa programkan di perguruan tinggi.
- 7. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Dosen Pembimbing PKL yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan magang.
- 8. Ibu Wan Anismah, S.H selaku instruktur PKL.
- 9. Bapak/Ibu pegawai yang telah membantu,membimbing serta memberikan panduan dan arahan sehingga penulis dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

0

UIN Suska

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Bapak/Ibu staff Fakultas Ekonomi Uin Suska Riau, khususnya untuk Dosen

oprogram studi D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberi ilmu da n

Spengetahuan kepada penulis.

11. Bapak/Ibu staff di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

PEKANBARU,18 JUNI 2024

Penulis

Niken Ayu Restiani NIM.02170623200

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

iv

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **DAFTAR ISI**

ABSTR.	AK	i
KATA I	PENGANTAR	ii
DĀFTA	R ISI	V
DAFTA	R TABEL DAN DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTA	R GAMBAR	ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
S	1.1 Latar Belakang	1
â	1.2 Rumusan Masalah.	8
20	1.3 Tujuan Penulisan.	8
	1.4 Manfaat Penulisan.	8
	1.5 Metode Penelitian.	9
	1.6 Jenis Data	9
	1.6.1 Data Primer	9
	1.6.2 Data sekunder.	9
	1.7 Metode Pengumpulan Data.	10
	1.7.1 Observasi.	10
	1.7.2 Wawancara	10
State	1.7.3 Dokumentasi.	10
e Is	1.8 Sistem Penulisan Tugas Akhir	10
BAB II	GAMBARAN UMUM	12
nic	2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kecamatan	
Un	Mandau.	12
ive	2.2 Gambaran Umum Instansi	13
TS:	2.3 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah	
у об	Kecamatan Mandau	13
uS j	2.4 Struktur Organisasi.	14
Iniversity of Sultan S	2.5 Uraian Tugas.	15
S	2.6 Susunan Struktur Organisasi.	17





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK.... 19 19 3.1 Tinjauan Teori ..... 3.1.1 Konsep dasar perpajakan. ..... 19 a 3.1.2 Jenis Pajak. 20 milk 3.1.3 Fungsi pajak ..... 21 3.1.4 Syarat pemungutan pajak ..... 21 3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak..... 23 3.1.6 Pembagian Pajak di Indonesia ..... 24 3.1.7 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak..... 27 Ka 3.1.8 Pengertian Wajib Pajak..... 28 3.1.9 Kewajiban Wajib Pajak..... 29 3.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan..... 29 30 3.1.11 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan..... 3.1.12 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ..... 31 3.1.13 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ..... 33 3.1.14 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 34 Perkotaan ..... 3.1.15 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 34 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 3.1.16 Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 36 dan Perkotaan..... 3.1.17 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ..... 38 3.1.18 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan ..... 42 3.1.19 Pajak Dalam Islam. 44 3.2 Tinjauan Praktik. 46 3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan....... 46 3.2.2 Kendala Wajib Pajak Bumi Membayar Pajak..... 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	51
-4.2 Saran	52

# DAFTAR PUSTAKA

# nilik UIN Suska Riau

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ОНа

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **DAFTAR TABEL**

_	
Tabel 1.1	
Tabel 1.2	
Tabel 3.1	
Tabel 3.2	

Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Di Wilayah Air Jamban	
Kecamatan Mandau	6
Evaluasi Dan Realisasi Penerimaan PBB Di Wilayah Air	
Jamban Kecamatan Mandau	7
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Wilayah Air	
Jamban Kecamatan Mandau	48
Realisai Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan	
Air Jamban, Kecamatan Mandau	49

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak milik UIN Suska

**DAFTAR GAMBAR** 

Gambar 2.1 Struktur UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2023 .....

14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ix

penulisan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# BAB I

# **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Suksesnya suatu pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari suatu tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Dengan pengolahan dana yang baik, maka suatu sektor pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita negara dan meningkatan pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat indonesia. Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang sangat besar, telah memberi peran yang sangat penting bagi pembangunan dengan perannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagai pencerminan warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu komponen pemasukan bagi negara yang potensial terhadap pemasukan negara. Hak pajak bumi dan bangunan ialah objek pajak meliputi bumi dan bangunan yang terletak dalam wilayah NKRI. Meskipun pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai sumber pendapatan untuk pembiayaan negara, namun dalam realita, akumulasi pajak masih sulit dilakukan oleh negara, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat konsistensi masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak diperlukan untuk kelancaran penarikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana masyarakat memenuhi semua kewajiban dan kegiatan hak perpajakannya. "Namun dalam kenyataanya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan. masyarakat yang patuh dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor kesadaran, sehingga masyarakat yang sadar akan tanggungjawab nya". Pajak bumi dan bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya untuk membangun daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar dilakukannya pemungutan oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat dipersilahkan mengurus rumah tangga sendiri serta bertanggungjawab.

Meskipun pajak disebut sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun pada realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai akibatnya persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang wajib dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak. Maka, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Dengan demikian, Jika dihubungkan menggunakan ajaran timbulnya utang pajak, maka Official Assessment System sesuai dengan timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran formil,artinya utang pajak timbul jika sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

Pada struktur pendapatan negara memiliki banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya sektor minyak dan gas serta sektor non minyak dan gas (misalnya adalah penerimaan dari sektor pajak ,retribusi,hibah,dan lain-lain). Ke-2 sektor sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pembangunan dengan cara keikutsertaan pada pembangunan nasional buat mewujudkan rakyat adil dan makmur.

Penerimaan untuk sektor migas sering mengalami fluktuasi harga yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang rupiah yang sangat rentan terhadap kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

atau keadaan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh karena itu dapat kita lihat untuk penerimaan sektor migas kurang dapat diandalkan secara konsisten. Dalam hal ini pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber yang ada seefektif dan seefisien mungkin.

Penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem pemungutan perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat diperlukan apabila melihat keadaan negara saat ini namun tetap memperhatikan asas keadilan. Tingginya tingkat penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DPJ untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Usaha meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak memiliki banyak kendala, antara lain dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut penelitian Andrea dan Teguh (2017:37-48) Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

(PBB P2) dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan Pengetahuan perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Pajak menurut Mardiasmo (2019:10) fungsi pajak ada dua yaitu:

- a. Fungsi budgetair yang berarti pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
- b. Fungsi mengatur (regulerend) yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Rahayu (2017:191) mengemukakan bahwa dimensi dan indikator Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:

- Manfaat adanya pajak, berkaitan degan persepsi wajib pajak serta paham akan pembayaran pajak dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan negara.
- 2. Sikap wajib pajak, berkaitan dengan tingkat pengetahuan dalam kesadaran bayar pajak, mengetahui adanya peraturan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan serta memiliki kesadaran dalam membayar pajak.
- 3. Tingkat pendapatan, berkaitan dengan keadaan finansial wajib pajak.
- Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Terhambatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak. Penerimaan PBB dapat ditingkatkan dengan kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah wajib pajak sebanyak 11.656, dan untuk tahun 2022 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan sehingga berjumlah 11.672, kemudian di tahun 2023 jumlah wajib pajak juga mengalami peningkatan sehingga berjumlah 12.296.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Diwilayah Air Jamban	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Persen
e I	2021	11.656	8.885	76.22%
lam 2	2022	11.672	9.001	77.12%
ic 4	2023	12.296	9.030	73.12%

📃 Sumber : Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2024

Dengan banyaknya jumlah wajib pajak dan adanya peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan, maka target yang sudah ditetapkan oleh UPT Pendapatan Daerah kecamatan Mandau terealisasi, hal ini dapat dilihat dari table berikut:



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

# © Hak cipta milik UIN S

# Tabel 1.2 Evaluasi Dan Realisasi Penerimaan PBB Di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau

No	Tahun	Pokok	Realisasi	Persen
		Ketetapan		
1	2021	1.592.259.902	567.868.366	35,7 %
2	2022	1.521.526.822	655.245.004	43,1 %
3	2023	1.834.450.169	726.360.260	39,6 %

Sumber: Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2024

Dari data diatas dapat diketahui pada tahun 2021 pokok ketetapan pajak PBB adalah sebesar 1.592.259.902 dan yang terealisasi sebesar 567.863.366. Pada tahun berikutnya 2022 pokok ketetapan pajak PBB adalah sebesar 1.521.526.822 dan yang terealisasi sebesar 655.245.004. Dan tahun 2023 pokok ketetapan pajak PBB adalah sebesar 1.834.450.169 dan yang terealisasi sebesar 726.360.260.

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa Pajak bumi dan Bangunan memberikan kontribusi yang potensi kepada Kabupeten Bengkalis. Berdasarkan uraian ringkasaan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat suatu judul laporan tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dari program studi D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB P2) PERDESAAN DAN PERKOTAAN UPT PENDAPATAN DI WILAYAH AR JAMBAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS".

eEityEf Sultan Syarif Kasim Riau



uska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

# 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah jelas diatas maka Trumus masalah yang ingin dikemukakan di penelitian ini adalah:

- Bagaimana kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan UPT Pendapatan di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau?
  - Apa saja kendala wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan UPT Pendapatan di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau?

# 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan karya ilmiah ini ialah untuk:

- 1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan UPT Pendapatan di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau
- 2. Untuk mengetahui apa saja kendala wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan UPT Pendapatan di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau

# 1.4 Manfaat Penulisan

Bagi Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai masukan dan bahan pengfaluasian bagi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kepatuhan wajib pajak

of Sultan Syarif Kasim Riau

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



\_

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Bagi Mahasiswa Penelitian ini diharapkan sebagai media pengetahuan dan tambahan referensi kepada mahasiswa lainnya dibidang perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan. Dan juga untuk mengelolah

baik secara teori maupun praktik.

kemampuan akademi

# 1.5 Metode Penelitian

# 1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Jl. Desa Harapan, Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

# 1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian, penulis melakukan penelitian UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri pada 24 Januari sampai dengan 26 Januari 2024.

# 1.6 Jenis Data

# 1.6.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung Kepala Bidang.

# 1.6.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumbersumber lainnya



1.7 Metode Pengumplan Data

# 1.7.1 Observasi

Observasi adalah perolehan aktif informasi dan sumber utama. Penulis turun langsung kelapangan untuk mengamati secara dekat permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai Kapatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Perkotaan Dan Pedesaan UPT Pendapatan Daerah Di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

# 1.7.2 Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (arikunto,2006). Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang.

# **Dokumentasi** 1.7.3

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data dari catatan dokumentasi maupun arsip sesuai dengan yang penulis butuhkan. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen dan arsip dari tempat penelitian.

# 1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut.

# BAB I **PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematik penulisan.

Dilarang mengutip

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Syarif Kasim Riau



# BAB II

N Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

# GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi tentang sejarah tempat penelitian, visi, misi, metto, dan struktur organisasi dan tugas pokok setiap unit kerja

# BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK

Bab ini membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, system pemungutan pajak, pengelompokan pajak, sanksi di bidang perpajakan, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian kepatuhan wajib pajak, pengertian wajib pajak, pengelompokan wajib pajak, hak wajib pajak, kewajiban wajib pajak, kewajiban wajib pajak.

# **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan keseimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bermanfaat dan diperlukan.

# DAFTAR PUSTAKA

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

# **BAB II**

# GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

# 2. TSejarah Kantor UPT Pendaptan Daerah Kecamatan Mandau

UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya Badan Pendapata Daerah ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan pasar. Namun, pada tahun 2000 BAPENDA di pecah menjadi 2 Badan yaitu: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Jadi, Badan Pendapatan Daerah dipecah menjadi dua, yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar.

Badan Pendapatan Daerah mengurusi pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, reklame dan sarang burung wallet, penerangan jalan non-PLN, parkir, pajak bumi dan bangunan, dan pajak BPHT. Sementara Badan Pecahannya yaitu Badan pasar focus menangani pajak retribusi dari pertamanan dan kebersihan kota.

Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (Pajak Bumi Bangunan) di kelola oleh UPTD Badan oleh pusat. Jadi wewenang pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Sering berkembangnya daerah di pecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan Perizinan dan penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin dari macam-macam pajak yang dikelola oleh BAPENDA yang dahulu juga menjadi tugas dari UPT Pendapatan Daerah.

UPT Pendapatan Daerah menurut peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

uska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Kabupaten Bengkalis Pasal 37 Ayat 3 UPT dipimpin oleh seseorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

# 2.2 Gambaran Umum Instansi

Nama Kantor: UPT Pendapatan Daerah Kec.Mandau Pada Bapenda

Kab.Bengkalis

Jl. Desa Harapan No 59, Air Jamban, Kecamatan Alamat

Mandau, Duri

Telpon : (0765) 91911

Email : UPTD.PBB-P2@GMAIL.COM

# 2.3 Visi, Misi dan Motto UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Adapun visi,misi,dan tujuan dari UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada BAPENDA Kab.Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatkan kualitas pelayanan.

2. Misi

Meningkatkan propesonalits aparatur pelaksanaan pelayanan PBB-P2, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2, Meninkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

3. Metto

tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

mencantumkan dan menyebutkan sumber



Тak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

sanggup

Melayani hati dengan maklumat ; dengan ini kami menyatakan menyelenggarakan pelayanan sesuai

dengan

pelayanan yang telah ditetapkan.

# 2.4. Strktur Organisai UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Z Struktur organisasi adalah suatu yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masingmasing bagian dengan tujuan untuk membina kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

# Gambar 2.1

Struktur UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2024



Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2024.

of Sultan Syarif Kasim Riau



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

nivers

of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

2.5 Uraian Tugas Berdasarkan struktur organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan mandau dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

# 1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Pada Bapeda Kab. Bengkalis menyusun suatu struktur organisasi dengan menguraikan beberapa tugas tiap-tiap bagian.

Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT Pendapatan Daerah Kec.

Mandau Pada BapendaKab. Bengkalis: Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf.
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan mentri keuangan RI kepada daerah.
- Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis.
- Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

# 2. Kepala Sub Bagian Tata usaha Dengan Uraian Tugas:

- . Membantu kepala UPT Pendapatan Daerah dalam mengelola administrasi umum dan kepegawaian.
- pengeloalaan penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.



łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

© Hak cipta milik t

Z

Tc. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah
Kecamatan Mandau

Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja Badan, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

# 3. Bidang Dana Perimbangana.

Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana
 Perimbangan lingkup Bagi hasil Pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

# 4. Bendahara

ity

ultan

Syarif Kasim Riau

- a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.
  - o. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada buku penerimaan sejenis dan buku kas umum.
  - . Menyetor semua jenis penerimaan daerah pad kas daerah Kabupaten Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Td. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan daerah Kecamatan Mandau.

# 6. Koordinator PBB

- a. Membantu tugas administrasi PBB-P2 pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
- b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan memantau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.
- Tugaslain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan

  Mandau.

# 7. Bagian Administrasi

- a. Laporan bulanan pajak.
- b. Pembukuan penerimaan bulanan
- c. Pendataan wajib pajak.

# 8. Petugas Pemungut Lapangan/Harian

- d. Memungut pajak
- e. Mengantar SPTPD
- f. Pendataan wajib pajak

# 2.6. Susunan Struktur Organisasi

Berikut susunan organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari :

- 71. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis.
- 2. Kepala Sub. Bagian tata usaha.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bidang Dana Perimbangan

Bidang Pajak, Retribusi dan pendapatan asli daerah.

Koordinator PBB-P2.

Bagian Administrasi.

Petugas pemungut lapanga Definisi Pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2017:1) pengertian pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bendahara.

uska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipt

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

# **BAB IV**

# **KESIMPULAN DAN SARAN**

# 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan nya diantara lain :

- 1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dapat dikatakan penerapany sudah baik karena lebih 70% wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku itu terlihat dengan banyaknya pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Penerapan sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan juga sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku.
- 2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap wajib pajak di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau adalah belum validnya data wajib pajak bumi dan bangunan, yang ada kurangnya pemahaman wajib pajak terhadapt adanya sanksi dan kurangnya disiplin wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya dengan tepat waktu, selain itu tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akibatnya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau kesulitan untuk memungut pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan. Masyarakat Kecamatan Mandau bersipat pasif apa lag i prosedur yang dilakukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) yang diedarkan melalui RT/RW kerumah-rumah warga sehingga membuat warga bersifat menunggu dan jarang bersifat aktif menanyakan SPPT ke kantor UPT Pendapatan Daerah.

yarif Kasim Riau



# 4.2 Saran

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasakan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran yang bisa diberikan terhadap penelitian ini adaloah sebagai berikut :

- 1. Untuk Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau harus mengecek dan mendata kembali mengenai wajib pajak yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dan disesuaikan dengan data yang ada sebelumnya, dan selalu meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang belum paham dengan peraturan perpajakan dan memberikan arahan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak.
- 2. Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat serta juga harus memberikan layanan info yang mudah diakses oleh wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran pajak, batas akhir pembayaran pajak serta sanksi administrasi yang diberikan akibat keterlambatan pembayaran pajak, sehingga hak dan kewajiban wajib pajak pun akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh

karya

mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# **DAFTAR PUSTAKA**

AL-Qur'an, Surah An-Nisaa' Ayat 29.

Agus, Jatmiko (2006). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi" Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis MegisterAkuntansi.

Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi kumadji dan Achmad Husaini.(2015).

"Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Tarif Pajak Dan
Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak"Di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Jurnal Perpajakan
(JEJAK) .Vol.6 No.2 tahun 2015

Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

A.S. Moenir. (2002). " Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia." Jakarta: PT. Bumi Aksara

Atik dan Ratminto.( 2012) "Manajemen Pelayanan" Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dwi Sari, M., Alwi, A., & Doktoralina, C. M. (2019). The Concept and Principles of Personality Measurement in Islam. Journal of Social and Political Sciences, 2(2).

Erawati, Teguh; Parera, Andrea Meylita Widyasti. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus".

Fandi Tjiptono dan Gregorius Chandra. (2016). "Layanan, Kualitas & Kepuasan, Edisi 4" ANDI, Yogyakarta

Gusfahmi. (2007). "Pajak Menurut Syariah" Jakarta: Raja Grafindo Persada

Muljono Djoko. (2010). "Panduan Brevet Pajak: PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB" Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Noviani, Elly. (2005). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Skripsi.Semarang: FIS UNNES. (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan).

Fannic University and Soultan Syarif Kasim Riau

Mar Novitan Syarif Kasim Riau



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

ini tanpa

mencantumkan dan menyebutkan sumber

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Resmi, Siti. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.

Rohmawati, Alifa Nur, dkk. (2013), "Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud)" Bali, Indonesia.

Rustianingsih. (2011). Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Di Indonesia, Jakarta:usisi Media.

Siahaan, Marihot P. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo persada

Rahayu,Siti Kurnia, (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 78

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





# DAFTARA PERTANYAAN WAWANCARA

Lampiran daftar pertanyaan tentang "Keptauhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan UPT Pendapatan Daerah Di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis".

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan UPT Pendapatan di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau?

KA UPT: Kepatuhanya warga tidak dituntut untuk memenuhi kepatuhan dalam membayar pajak, melainkan atas dasar diri sendiri. Aakan tetapi masyarakat tidak melewati batas waktu jatuh tempo pada tanggal 30 Semptember, ketika sampai melewati jatuh tempo maka akan dikenakan berupa denda 20%.

2. Kendal apa saja dalam kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan UPT Pendapatan di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau?

KA UPT: Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akibatnya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau kesulitan untuk memungut pajak,termasukpajak bumi dan bangunan. Masyarakat kecamatan Mandau bersifat pasif,apa lagi prosedur yang dilakukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) yang diedarkan melalui RT/RW ke rumah warga bersifat menunggu dan jarang bersifat aktif menanyakan SPPT ke kantor UPT Pendapatan Daerah setempat secara pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I

Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# Dokumentasi Saat Penelitian di Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau







Pelaksanaan pada, 26 Januari 202

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **BIOGRAFI PENULIS**



Niken Ayu Restiani, lahir di Karyamukti, Riau pada tanggal 30 Januari 2003. Anak pertama dari empat bersaudara,lahir dari pasangan Ayahanda Tri Mulyono dan Ibunda Nur Pujiasiah. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-

Kanak Al-Muhajirin (2009), Sekolah Dasar Negeri 010 Karyamukti (2010-2015), kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Rimba Melintang (2015-2018). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Menengah Akhir di SMA Negeri 02 Bangko Pusako (2018-2021) dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di UPT Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dari bulan Juli hingga Agustus 2023. Dan demi menyelesaikan pendidikan di program studi D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan tugas akhir dengan judul "Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan UPT Pendapatan Daerah di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis"

mar University of Sultan Syarif Kasim Riau



N

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Riau

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis

# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL كلية العلوم الاقتصادية والاجتما عية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

brantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

B-7445/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023

Pekanbaru, 14 Desember 2023 M 1 Jumadil Akhir 1445 H

Bimbingan Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dr. Muhammad April, SH, M.Hum Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

: Niken Ayu Restiani Nama 02170623200 NIM D-III Perpajakan Jurusan Semester

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: "KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DI KANTOR UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU".

Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga,

♠Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si NIP. 19790101 200710 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif

Kasim Riau



N Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Riau

# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL كلية العلوم الاقتصادية والاجتما عية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Sifat Hal

B-229/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024

Biasa

Izin Penelitian

Pekanbaru, 08 Januari 2024 M 26 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada

Yth. Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Riau di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama

Niken Ayu Restiani NIM. 02170623200 Jurusan D-III Perpajakan Semester V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan di Kantor UPTD Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> Mahyarni, SE, MM TP: 19700826 199903 1001

UIN SUSKA RIAU CZ

State Islamic University of Sultan Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis

Dilarang mengutip ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU

JL. DESA HARAPAN No. 59 TELP. (0765) 91911 DURI

Duri, 19 Februari 2024

Nomo Sifat Lampiran

Ka

: 953/UPTD/2024/032 : Umum

Perihal

: Izin Penelitian

Kepada

dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

di -

**Tempat** 

Berdasarkan surat Saudara Nomor B-229/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Perihal izin Praktek Kerja Lapangan atas nama:

Nama

: Niken Ayu Restiani

NIM

: 02170623200

Program Studi: D3 Perpajakan

Berhubungan dengan hal diatas kami UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Memberi Izin Kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian di Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

ALA UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU

NIP. 19731114 200701 2 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau